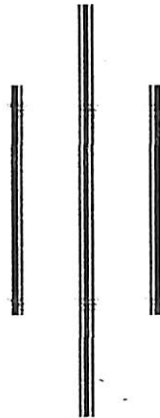




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

# **RENJA TAHUN 2019**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

PADANG PANJANG, 2018

# DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LataBelakang	1
	1.2 LandasanHukum	1
	1.3 MaksuddanTujuan	3
	1.4 Sistematika RENJA BPKD	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD / DPPKAD TAHUN 2016	4
	2.1 EvaluasiPelaksanaanRenjaTahun 2016 danCapaianRenstraTahun 2013-2016	4
	2.2 AnalisisKinerjaPelayananOPD	14
	2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi BPKD	19
	2.4 Review TerhadapRancanganAwal RKPD	21
	2.5 PenelaahanUsulan Program danKegiatanMasyarakat	29
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	37
	3.1 TelaahanterhadapKebijakanNasional	37
	3.2 TujuandanSasaranRenjaOPD	37
	3.3 Program danKegiatanRenjaOPD	38
BAB IV	PENUTUP	47

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

NOMOR : 900/ /BPKD-PP/2018

TANGGAL :

HAL : RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019



## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka penyusunan Renja OPD di dasarkan pada aspirasi masyarakat yang diakomodir melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, dalam hal ini BadanPengelolaKeuangan Daerah Kota Padang Panjang juga harus menyusun Rencana Kerja tersebut untuk periode 1 (satu) Tahun kedepan.

Rencana Kerja BadanPengelolaKeuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kesatu dari Renstra BPKD Tahun 2018-2023 serta perencanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 ), sehingga penyusunan Renja BPKD Tahun 2019 ini berpedoman pada Renstra BPKD dan RPJMD Kota Padang Panjang2018-2023, dalam rangka melaksanakan rencana yang telah dirumuskan melalui kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode2018-2023.Disamping itu Renja BPKD Tahun 2019 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019.

BadanPengelolaKeuangan Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta bertugas dan berfungsi membantu Kepala Daerah dalam hal koordinasi masalah Pengelolaan Keuangan Daerah, berkewajiban untuk menyusun RENJA BPKDTahun 2019 disusun secara sistematis dan analis dengan memperhatikan isu serta perkembangan kondisi terkini penyusunan rencana pembangunan, terutama sekali dalam rangka pencapaian target pembangunan lima tahunan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Secara legalitas formal, penyusunan rencana kerja BadanPengelolaKeuanganDaerah untuk tahun 2018 Dasar hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang;
14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor.....Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor.....Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019;
17. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Nomor ....Tahun 2..... tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja BPKD ini adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program BPKD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi BPKD Kota Padang Panjang.
2. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BPKD untuk tahun 2018. Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja BPKD ini ditujukan untuk:
  1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf BPKD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2018.
  2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2018.
  3. Menjadikan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKD pada tahun 2018.
  4. Menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan isu dan masalah yang mendesak agar lebih terarah.

### 1.4. Sistematika Renja BPKD

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2019 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun Lalu yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun 2018 dan Capaian Renstra BPKD, Analisis Kinerja Pelayanan BPKD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang).
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan, yang terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi, Tujuan dan Sasaran Renja BPKD, Program dan Kegiatan BPKD.
- BAB IV : Penutup

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN 2017

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2016

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKD dan/atau realisasi APBD untuk BPKD.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPKD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan Renja BPKD Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2017 pada umumnya terlaksana 100 %, Namun ada 1 kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan.

### 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kegiatan yang tidak memenuhi target sesuai dengan rencana awal adalah :

- a. Kegiatan pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. Realisasi capaian target kegiatan ini hanya 2,18 M (98%) dari target PBB-P2 dan BPHTB yang ditetapkan sebesar 2.23 M.
- b. Kegiatan Kajian Investasi Daerah, dari 2 target yang rencanakan hanya 1 kajian yang dapat terlaksana sehingga realisasi fisik kegiatan ini hanya 50%.

### 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tahun 2017 Badan Perencanaan Daerah Kota Padang Panjang menetapkan 5 Program dan 41 Kegiatan guna memenuhi target Renstra yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari 41 Kegiatan yang ada, 39 kegiatan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini seperti terlihat pada tabel 2.1.

**2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Tidak terdapat program/kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dari yang telah direncanakan.

**2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya program/kegiatan pada BPKD disebabkan oleh faktor eksternal dimana kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar PBB-P2, sedangkan faktor penyebab terpenuhi target kinerja adalah adanya regulasi yang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

**2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Dari review berdasarkan target kinerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renstra BPKD 2008-2013, realisasi capaian kinerja kurang dari 100%.

Pencapaian target program/kegiatan terhadap Implikasi capaian program Renstra telah mencapai 50% target yang ditetapkan hal ini dikarenakan target perubahan Renstra hanya untuk 2 tahun.

**2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Kebijakan dan tindakan

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BPKD maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKD dan Pencapaian Renstra BPKD sampai dengan Tahun 2017 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TAHUN BERJALAN ( 2018 )**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD tahun 2017			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan berjalan Realisasi Capaian Target SKPD s/d Tahun 2018				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Keluaran Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>URUSAN WAJIB</b>												
	<b>Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>												
1	20	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan Listrik	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya premi asuransi BMD	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Dinas/operasional	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%



1	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	-	2 Tahun	100%
1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya fasilitas komponen jaringan listrik kantor	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya pelaksanaan rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	19	Penyediaan jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya gaji pegawai honorer jasa adm.perkantoran	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	01	21	Pencetakan DAGDA dengan Sistem Komputerisasi	Jumlah amprah gaji PNS di lingkungan Pemko Padang Panjang	2 Tahun ( 1.876 amprah Gaji )		1 Tahun (938 amprah gaji )	1 Tahun (868 amprah gaji )	100 %	-	2 Tahun (1.876 amprah Gaji )	100%

			32	Penyediaan Sewa Tanah	Tersedianya sewa tanah untuk kantor dengan PT.KAI	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
1	20	2	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2		kendaraan roda 4 (1 unit)	kendaraan roda 4 (1 unit)	100 %	kendaraan roda 4 (1 unit)	kendaraan roda 4 (1 unit)	16%
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan 1 unit genset, 1 paket Perlengkapan/dudukan genset, 7 unit penghancur kertas, 2 unit tangga lipat, 1 unit meja resepsionis, 1 unit tempat tidur, 1 unit lemari hias, 1 unit pengadaan gantungan pakaian, 1 unit vacum cleaner, 1 unit pressure washer, 1 set TV LED, 1 unit laptop, 1 unit printer laser jet, 1 unit scanner, 1 unit kamera digital, 1 unit infokus, 1 unit server, 1 unit mic wareless, 2 bh rak sepatu, 8 unit komputer, 15 m karpet		Pengadaan 1 unit genset, 1 paket Perlengkapan/dudukan genset, 7 unit penghancur kertas, 2 unit tangga lipat, 1 unit meja resepsionis, 1 unit tempat tidur, 1 unit lemari hias, 1 unit pengadaan gantungan pakaian, 1 unit vacum cleaner, 1 unit pressure washer, 1 set TV LED, 3 unit laptop, 1 unit printer laser jet, 1 unit scanner, 1 unit kamera digital, 1 unit infokus, 1 Server, 1 mic wareless, 2 rak sepatu, 8 unit komputer, 15 m carpet		100 %	Pengadaan alat dapur, 2 unit Mesin Penghancur Kertas, 1 unit kulkas satu pintu, 1 unit rak sepatu, 15 meter karpet, 7 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit server, 1 unit printer, 1 unit UPS, 1 unit Portable disk, 1 unit printer A3, 1 set Mic Comperence digital, 3 unit kamera	Pengadaan 1 unit genset, 1 paket Perlengkapan/dudukan genset, 7 unit penghancur kertas, 2 unit tangga lipat, 1 unit meja resepsionis, 1 unit tempat tidur, 1 unit lemari hias, 1 unit pengadaan gantungan pakaian, 1 unit vacum cleaner, 1 unit pressure washer, 1 set TV LED, 1 unit laptop, 1 unit printer laser jet, 1 unit scanner, 1 unit kamera digital, 1 unit infokus, 1 unit server, 1 unit mic wareless, 2 bh rak sepatu, 8 unit komputer, 15 m karpet	100%

1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor secara berkala	2 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	2 Tahun	100%
1	20	2	83	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Tersertifikatkannya Tanah Milik Pemerintah Daerah	2 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	100 %	-	1 Sertifikat	50%
1	20	04		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									
1	20	04	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	1 Tahun 130 stel		-	-	-	1 Tahun 162 stel	1 Tahun 162 stel	124%
1	20	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
1	20	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang	Terkirimnya PNS untuk mengikuti bintek tentang Peraturan PerUndang-Undangan	100%		100%	100%	100 %	100%	100%	100%
1	20	05	50	Pelatihan Kantor Sendiri	Peningkatan Kapasitas SDM	100% 75 Orang		-	-	0 %	100% 75 Orang	100% 75 Orang	100%
1	20	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
1	20	06	06	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran daerah	Tersedia buku laporan Semesteran Daerah	170 buku		100 buku	70 buku	100 %	60 buku	130 buku	76%
1	20	06	07	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran Daerah	Tersedia buku Laporan Prognosis Daerah	85 buku		50 buku	35 buku	100 %	35 buku	70 buku	83%

1	20	06	08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Daerah	Tersedianya buku Laporan Akhir Tahun Daerah	200 buku		100 buku	100 buku	100 %	110 buku	210 buku	105%
	20	05	06	Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Data Laporan Keuangan yang telah diverifikasi	96 buku		60 Buku	48 buku	100 %	48 Buku	96 Buku	100%
1	20	17		<b>Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah</b>									
1	20	17	06	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang APBD	Tersedianya Buku Ranperda dan Perda tentang APBD	200 buku		240 buku	120 buku	100 %	85 buku	205 buku	103%
1	20	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersedianya Buku Ranperda dan Perda tentang Perubahan APBD	160 buku		240 buku	120 buku	100 %	130 buku	150 buku	100%
1	20	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya Buku Ranperda dan Perda ttg Pertanggungjawaban APBD	625 buku		70 buku	70 buku	100 %	125 buku	125 buku	94%
1	20	17	13	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Lancarnya penyusunan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis Aplikasi	27 SKPD ( 2 tahun /100 %)		27 SKPD ( 1 tahun /100 %)	27 SKPD ( 1 tahun /100 %)	100 %	27 SKPD ( 1 tahun /100 %)	27 SKPD ( 1 tahun /100 %)	100%
1	20	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya Target Pajak dan Retribusi Daerah	100%		100%	100%	100 %	100%	100%	100%
1	20	17	22	Penelitian dan pengadaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Tersedianya Buku DPA dan DPPA SKPD	838 buku		760 buku	720 buku	100 %	600 buku	1.320 buku	157%
1	20	17	28	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB	Tercapainya Target PBB-P2 dan BPHTB	13.000.000 OP / 1,4 M		12.000.000 OP/ 2.23 M	12.000.000 OP/ 2.186 M	98 %	12.000.000 OP/ 1,25 M	12.000.000 OP/ 3.436 M	100%

1	20	17	25	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	Tersedianya Buku Laporan Semester dan buku laporan Tahunan BMD	120 buku							
1	20	17	36	Penyusunan Standar Biaya	Tersedianya buku standar biaya	140 Buku		45 buku	40 buku	100 %	70 buku	110 buku	79%
1	20	17	26	Penghapusan dan Penjualan BMD	Tersedianya buku Penghapusan & Penjualan BMD	20 Buku		10 Buku	10 Buku	100 %	10 Buku	20 Buku	100%
1	20	17	27	Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	Tersedianya RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	240 Buku		90 buku	90 buku	100 %	30 buku	120 Buku	50%
1	20	17	53	Penyusunan Perubahan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	Tersedianya Perubahan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	240 Buku		-	-	-	30 buku	30 buku	25%
1	20	17	50	Pendataan Objek Pajak	Tersedianya Data Objek Pajak PBB-P2	16 Kelurahan		4 Kelurahan	3 Kelurahan	100 %	13 Kelurahan	16 Kelurahan	100%
1	20	17	30	Pengkajian Investasi Daerah	Tersedianya data kajian investasi daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	-	1 Dokumen	100%
1	20	17	45	Penyajian Data Aset Daerah	Tersajinya data daerah (BMD) secara periodik dan valid	120 buku		60 buku	60 buku	100 %	60 buku	120 buku	100%
1	20	17	59	Penghapusan Data Piutang Penyerahan PBB-P2	Keputusan Walikota tentang Penghapusan piutang PBB-P2 Kota Padang Panjang	100%		-	-	-	100%	100%	100%

1	20	17	49	Penyusunan ranperda Pengelolaan barang milik daerah	1 tertatanya manajemen aset/ barang daerah	1 ranperda				100 %	-	
1	20	17	49	Penyusunan ranperda Pengelolaan barang milik daerah	Tertatanya manajemen aset/ barang daerah	1 Ranperda	1 Ranperda	1 Ranperda		100 %	-	100%

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**

**INDRA GUSNADY, SE, M.Si**

**NIP. 19700804 199803 1 006**

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan hal mutlak yang harus menjadi perhatian dalam rangka menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban dan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dalam upaya mewujudkan fungsi dari APBD itu sendiri yang meliputi:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan Fungsi-fungsi tersebut, maka dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa prinsip disiplin yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
3. Pelaksanaan Anggaran, dimana semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD, sebagai berikut :



**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BPKD  
Kota Padang Panjang**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
1.	Meningkatnya pemahaman SDM tentang Pengelolaan keuangan daerah			55 orang	55 orang			55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	Peningkatan pemahaman SDM pengelola di BPKD dan OPD lingkungan Pemerintah Kota Padang panjang
2.	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis aplikasi dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah			27 SKPD (100%)	27 SKPD (100%)			27 SKPD (100%)	27 SKPD (100%)	27 SKPD (100%)	27 SKPD (100%)	Aplikasi Pendukung Pengelola Keuangan Daerah ( SIPKD )
3.	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu			4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	LRA, LO, Neraca dan LPE
4.	Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya			2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	WTP
5.	Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah			14000	14200			14000	14200	14200	14200	PAD = 86.928.875.415 (22,3%) dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp.517.050.222.000

	peningkatan PAD											5 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum Perwako Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha
8.	Meningkatnya pemahaman SDM tentang peraturan Daerah PBB-P2			70	80			70	80	70	80	Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang PBB P2 Perwako Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum Perwako Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha
9.	Terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD ( buku daftar rencana kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD )			45 buku ( 27 SKPD )	45 buku ( 27 SKPD )			45 buku ( 27 SKPD )	45 buku ( 27 SKPD )	45 buku ( 27 SKPD )	45 buku ( 27 SKPD )	Perwako Nomor 18 Tahun 2010 tentang Sistim Prosedur Pengelolaan BMD Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kota Padang Panjang
10.	Tersajinya data daerah ( BMD ) secara periodik dan valid			60 buku ( 27 SKPD )	60 buku ( 27 SKPD )			60 buku ( 27 SKPD )	60 buku ( 27 SKPD )	60 buku ( 27 SKPD )	60 buku ( 27 SKPD )	Daftar Barang / Aset yang aktif dalam buku inventaris aset Kota Padang Panjang
11.	Ditingkatkannya opini WDP menjadi WTP atas LKPD			WTP	WTP			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Terkelolanya Aset Daerah			70	70			70	70	70	70	PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Perwako Nomor 18 tahun 2010 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan BMD

	bantuan yang belum memiliki nilai											Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Perwako Nomor 18 tahun 2010 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan BMD
15.	Meningkatnya pemahaman SDM tentang pengelolaan aset daerah			116	116			116	116	116	116	SDM Pengurus dan Penyimpan Barang OPD yang memahami Pengelolaan Aset / BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
17.	Jumlah kendaraan, Bangunan dan Pasar yang diasuransikan			5 Polis	5 Polis			5 Polis	5 Polis	5 Polis	5 Polis	Premi Asuransi Pasar, Premi Asuransi Kendaraan, Premi Asuransi Bangunan, Premi Asuransi Kebakaran, Premi Asuransi Gempa Bumi

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun dalam fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), disadari bahwa pada tahun 2017 ini BPKD belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, adapun penyebab belum optimalnya tugas dan fungsi tersebut karena adanya Adapun hal mutlak yang harus menjadi perhatian dalam rangka menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggung-jawabkan. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban dan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dalam upaya mewujudkan Fungsi dari APBD itu sendiri yang meliputi Fungsi Otorisasi, Fungsi Perencanaan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi dan Fungsi Stabilisasi. Namun selama Tahun 2016 pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan ini belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

### **2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan pelayanan dan tugas BPKD masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan untuk menjalankan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Terbatasnya Sumber dan Potensi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Kota Padang Panjang merupakan Kota kecil dengan luas 2.300 hektar dengan 2 Kecamatan. Dengan kecilnya luas wilayah, Kota Padang Panjang hanya dapat melakukan 9 jenis Pajak Daerah dari 11 Jenis Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 dan 16 Jenis Retribusi dari 30 Jenis Retribusi yang dibolehkan. Hal ini tentu saja membatasi ruang gerak untuk penambahan Sumber dan Potensi PAD.
2. Belum optimalnya perangkat daerah dalam menegakan peraturan tentang pajak dan retribusi daerah.

Hubungan kekeluargaan yang kental di masyarakat minangkabau menjadi salah satu penghalang bagi aparat penegakan PERDA untuk berbuat lebih tegas kepada Wajib Pajak. Hal ini juga di sebabkan oleh belum adanya regulasi yang tegas dalam penindakan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi di Kota Padang Panjang.

3. Seringnya perubahan peraturan dari pemerintah pusat tentang Pengelolaan Keuangan yang sangat cepat. Regulasi Pemerintah yang sering berubah-ubah mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan bagi daerah dalam mengadaptasi peraturan yang baru, keragu-raguan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berimbas pada hasil yang akan dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Kurangnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik di OPD maupun di BPKD sendiri. Penempatan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang belum sesuai dengan latar belakang ilmu dan kemampuan aparatur berakibat pada seringnya terjadi penggantian aparatur pengelola keuangan dan aset bahkan dipertengahan Tahun Berjalan, sehingga akan mengganggu proses administrasi keuangan.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional

Secara umum program kegiatan yang menjadi alat untuk pencapaian kinerja BPKD telah memenuhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Capaian Program Nasional yaitu Aksi Pemberantasan Korupsi.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan BPKD

Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, BPKD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, melaksanakan fungsi-fungsi keuangan yang strategis, antara lain:

1. Fungsi Penganggaran
2. Fungsi Perbendaharaan
3. Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Fungsi Pengelolaan Aset

Fungsi-fungsi diatas sesuai prinsip pada suatu organisasi dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda. Namun kondisi saat ini terjadi penggabungan fungsi dalam suatu organisasi.

Pada BPKD Kota Padang Panjang terdapat pemisahan dan penggabungan fungsi-fungsi keuangan tersebut, untuk Fungsi Penganggaran pada BPKD merupakan Bidang khusus yang menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsi keuangan sementara untuk Fungsi Perbendaharaan dan Fungsi Akuntansi, pada BPKD Kota Padang Panjang pelaksanaannya tergabung dalam satu bidang, yaitu Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, hal ini tidak tepat karena masing-masing fungsi sangat berbeda. Penggabungan kedua fungsi tersebut dalam 1 ( Satu ) bidang akan mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tindak lanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

Berdasarkan review penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKD selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKD, sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber dan Potensi Pendapatan Daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan PAD
2. Belum Optimalnya Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan PERDA di bidang perpajakan dan retribusi daerah dan pengoptimalan pelaksanaannya.
3. Masih terbatasnya pengetahuan aparatur Pengelola Keuangan baik di Bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan maupun Aset dalam mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan.
4. Belum Optimalnya koordinasi proses pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan OPD, sehingga memperlambat pembuatan laporan Pertanggung-jawaban Keuangan SKPD.
5. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah.

#### **2.4. Review Terhadap rancangan awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Walikota.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang guna mendukung target dan sasaran Pembangunan khususnya pembangunan di daerah seperti terlihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

## Kota Padang Panjang

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>					<b>6.760.919.390</b>					<b>7.415.736.457</b>	
1	<b>Program Pelayanan Adminstarsi Perkantoran</b>				<b>3.896.890.245</b>	<b>Program Pelayanan Adminstarsi Perkantoran</b>				<b>4.248.086.245</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	6.800.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Padang Panjang	Tersedianya dana untuk pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	1 Tahun	151.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Padang Panjang	Tersedianya dana untuk pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	1 Tahun	165.800.000		
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang Panjang	Terbayarnya Premi asuransi barang milik daerah	4 polis ( 1 tahun )	735.919.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang Panjang	Terbayarnya Premi asuransi barang milik daerah	4 polis ( 1 tahun )	563.050.000		
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Padang Panjang	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Roda 4 : 8 unit Roda 2 : 28 Unit	487.105.520	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Padang Panjang	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Roda 4 : 8 unit Roda 2 : 28 Unit	469.145.520		

			Administrasi Keuangan			keuangan		Administrasi Keuangan		1.339.000.000	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Padang Panjang	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	1 tahun	408.856.725	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Padang Panjang	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	1 tahun	365.881.725	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Padang Panjang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	106.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Padang Panjang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	130.000.000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Padang Panjang	Tersedianya persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	205.710.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Padang Panjang	Tersedianya persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	192.070.000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang Panjang	Tersedianya fasilitas komponen jaringan listrik kantor	1 tahun	7.827.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang Panjang	Tersedianya fasilitas komponen jaringan listrik kantor	1 tahun	7.827.000	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Padang Panjang	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu dinas	1 Tahun	47.760.000	Penyediaan makanan dan minuman	Padang Panjang	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu dinas	1 Tahun	99.000.000	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Padang Panjang	Tersedianya Pelaksanaan rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	1 Tahun	355.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Padang Panjang	Tersedianya Pelaksanaan rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	1 Tahun	735.100.000	



	Administrasi /Teknik Perkantoran		Jasa administrasi perkantoran			Administrasi /Teknik Perkantoran		honorer jasa administrasi perkantoran			
13	Pencetakan DAGDA dengan Sistem Komputerisasi	Padang Panjang	Jumlah amprah gaji PNS di lingkungan Pemko Padang Panjang untuk 14 bulan	1 Tahun ( 938 amprah gaji )	51.400.000	Pencetakan DAGDA dengan Sistem Komputerisasi	Padang Panjang	Jumlah amprah gaji PNS di lingkungan Pemko Padang Panjang untuk 14 bulan	1 Tahun ( 938 amprah gaji )	51.400.000	
14	Penyediaan Sewa Tanah	Padang Panjang	Tersedianya sewa tanah dengan PT. KAI	6 kapling	50.000.000	Penyediaan Sewa Tanah	Padang Panjang	Tersedianya sewa tanah dengan PT. KAI	6 kapling	71.000.000	
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1.038.680.645</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>910.902.212</b>	
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Padang Panjang	Tersedianya Kendaraan dinas untuk operasional Kantor	1 Unit roda 4 4 Unit Kendaraan roda 2	254.450.000	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Padang Panjang	Tersedianya Kendaraan dinas untuk operasional Kantor	1 Unit roda 4 4 Unit Kendaraan roda 2	254.315.612	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Padang Panjang	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan 4 Unit Printer, 3 unit Komputer PC, 1 Unit UPS, 4 Unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4	682.650.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Padang Panjang	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan 4 Unit Printer, 3 unit Komputer PC, 1 Unit UPS, 4 Unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4	545.005.955	

	kantor		gedung kantor yang memadai			gedung kantor		gedung kantor yang memadai		30.000.000
4	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor	Padang Panjang	Terpeliharanya peralatan kantor secara berkala	1 Tahun	45.000.000	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor	Padang Panjang	Terpeliharanya peralatan kantor secara berkala	1 Tahun	40.000.000
5	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Tersefikatkannya Tanah Pemerintah Daerah	2 Sertifikat	6.580.645	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Tersefikatkannya Tanah Pemerintah Daerah	2 Sertifikat	6.580.645
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>42.550.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>89.550.000</b>
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang Panjang	Terkirimnya PNS untuk mengikuti bintek tentang peraturan perundang-undangan	1 Tahun	42.550.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang Panjang	Terkirimnya PNS untuk mengikuti bintek tentang peraturan perundang-undangan	1 Tahun	89.550.000
IV	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>87.068.500</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>69.118.500</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran daerah	Padang Panjang	Tersedianya buku laporan keuangan Semesteran Daerah yang jelas dan akuntabel	70 buku	9.725.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran daerah	Padang Panjang	Tersedianya buku laporan keuangan Semesteran Daerah yang jelas dan akuntabel	70 buku	9.725.000
2	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran daerah	Padang Panjang	Tersedianya buku Laporan keuangan Prognosis Daerah	35 buku	2.333.500	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran daerah	Padang Panjang	Tersedianya buku Laporan keuangan Prognosis Daerah	35 buku	2.333.500

	Keuangan Akhir Tahun Daerah		Keuangan Akhir Tahun Daerah		67.250.000	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Daerah	Panjang	buku Laporan Akhir Tahun Daerah		49.300.000	
4	Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD	Padang Panjang	Tersedianya Informasi Data Laporan Keuangan yang telah diverifikasi per triwulan	48 Buku	7.760.000	Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD	Padang Panjang	Tersedianya Informasi Data Laporan Keuangan yang telah diverifikasi per triwulan	48 Buku	7.760.000	
V	<b>Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah</b>				<b>1.695.730.000</b>	<b>Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah</b>				<b>2.098.079.500</b>	
1	Penyusunan standar biaya	Padang Panjang	Tersedianya Buku Standar Satuan Biaya	70 buku	30.400.000	Penyusunan standar biaya	Padang Panjang	Tersedianya Buku Standar Satuan Biaya	70 buku	45.960.000	
2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Padang Panjang	Tersedianya Buku Ranperda dan Perda serta Ranperwako dan Perwako tentang APBD	4 Dokumen	100.600.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Padang Panjang	Tersedianya Buku Ranperda dan Perda serta Ranperwako dan Perwako tentang APBD	4 Dokumen	208.187.500	
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Padang Panjang	Tersedianya Buku Ranperda dan Perda serta Ranperwako dan Perwako tentang Perubahan APBD	4 Dokumen	102.100.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Padang Panjang	Tersedianya Buku Ranperda dan Perda serta Ranperwako dan Perwako tentang Perubahan APBD	4 Dokumen	109.450.000	
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Padang Panjang	Tersedianya Buku Ranperda ttg Pertanggungjawaban APBD	125 buku	80.440.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Padang Panjang	Tersedianya Buku Ranperda ttg Pertanggungjawaban APBD	125 buku	80.480.000	

	pengelolaan keuangan daerah		Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual			pengelolaan keuangan daerah		Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual		
6	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Padang Panjang	Tercapainya Target Pajak dan Retribusi Daerah	1 Tahun	330.950.000	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Padang Panjang	Tercapainya Target Pajak dan Retribusi Daerah	1 Tahun	390.702.000
7	Penelitian dan penggandaan DPA-OPD dan DPPA OPD	Padang Panjang	Tersedianya DPA OPD dan DPPA OPD Kota Padang Panjang	760 buku	101.300.000	Penelitian dan penggandaan DPA-OPD dan DPPA OPD	Padang Panjang	Tersedianya DPA OPD dan DPPA OPD Kota Padang Panjang	760 buku	76.195.000
8	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB	Padang Panjang	Meningkatnya penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100% 13000 OP/ 1,4 M	343.525.000	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB	Padang Panjang	Meningkatnya penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100% 13000 OP/ 1,4 M	400.000.000
9	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan tahunan Barang Milik Daerah	Padang Panjang	Tersedianya Buku Laporan Semester dan buku laporan Tahunan BMD	60 Buku	7.010.000	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan tahunan Barang Milik Daerah	Padang Panjang	Tersedianya Buku Laporan Semester dan buku laporan Tahunan BMD	60 Buku	7.010.000
10	Penghapusan dan Penjualan BMD	Padang Panjang	Tersedianya buku Penghapusan & Penjualan BMD	1 tahun	119.615.000	Penghapusan dan Penjualan BMD	Padang Panjang	Tersedianya buku Penghapusan & Penjualan BMD	10 buku	119.580.000
11	Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	Padang Panjang	Tersedianya buku RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	120 Buku	68.050.000	Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	Padang Panjang	Tersedianya buku RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	120 Buku	58.550.000
12	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Padang Panjang	Jumlah Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah	1 Ranperda	-	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Padang Panjang	Jumlah Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah	1 Ranperda	16.275.000

			data aset tetap Pemerintah Kota Padang Panjang	( 60 buku )	10.940.000	Aset Daerah	Panjang	buku data aset tetap Pemerintah Kota Padang Panjang	( 60 buku )	10.940.000	
14	Pendataan Objek Pajak	Padang Panjang	Terdata ulang kembali jumlah OP	4 kelurahan	-	Pendataan Objek Pajak	Padang Panjang	Terdata ulang kembali jumlah OP	4 kelurahan	100.000.000	
15	Pengkajian Potensi PAD Kota Padang Panjang	Padang Panjang	Jumlah Kajian	1 Kajian	-	Verifikasi Data Piutang Penyerahan PBB P2 Kecamatan Padang Panjang Barat	Padang Panjang	Terverifikasi Data Data Piutang PBB P2 Kecamatan Padang Panjang Barat hasil penyerahan kewenangan dari pusat	1 Tahun	43.000.000	
16	Pengkajian Investasi Daerah	Padang Panjang	jumlah Kajian Investasi Daerah	2 Hasil Kajian Ivestasi Daerah	34.600.000	Pengkajian Investasi Daerah	Padang Panjang	jumlah Kajian Investasi Daerah	2 Hasil Kajian Ivestasi Daerah	69.050.000	
17	Penyusunan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	Padang Panjang	Tersedianya Draf dan Buku Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Ranperda	50.000.000	Penyusunan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	Padang Panjang	Tersedianya Draf dan Buku Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Ranperda	50.000.000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagian besar tidak berasal dari usulan masyarakat dan stockholder pembangunan yang tertampung melalui Musrenbang Kelurahan, Kecamatan bahkan Musrenbang Kota. Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh BPKD Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi sebagai OPD maupun sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ) dalam mendukung pelaksanaan urusan Pengelolaan Keuangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk lebih jelasnya Usulan Program dan Kegiatan pada pelaksanaan Rencana Kerja BPKD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019  
Kota Padang Panjang

OPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN WAJIB				
	Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Bidang Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawalan dan Persandian				
1	Perkantoran Program Pelayanan Administrasi dan Persandian				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah Materai Yang dibutuhkan	Materai 6000 sebanyak 1500 lembar dan Materai 3000 sebanyak 1500 lembar	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Padang Panjang	Jumlah Tagihan Telephone,Air, Listrik,Internet, TV Kabel dan Jasa Publikasi	60 Tagihan untuk 1 Tahun dan 1 kali Jasa Publikasi	
	3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Padang Panjang	Jumlah Premi Asuransi Barang Milik Daerah yang diasuransikan	4 Polis ( Premi asuransi Pasar, Premi asuransi kendaraan, Premi asuransi kebakaran, Premi asuransi gempa bumi)	
	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipeliharakan dan Gaji THL yang dibayarkan Gajinya	- THL ( Sopir ) 6 orang	





	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Pengadaan 10 unit komputer PC, 25 Unit UPS, 10 Unit Printer, 5 Unit Laptop, 2 Unit Printer Laser jet, 1 Unit Mesin Fotocopy, 2 Unit Speaker	
	3	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Padang Panjang	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor secara berkala	1 Gedung	
	4	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor	Padang Panjang	Terpeliharanya peralatan kantor secara berkala	1 tahun	
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang Panjang	Jumlah PNS untuk mengikuti bintek tentang peraturan perundang-undangan	30 orang	
	2	Pelatihan Kantor Sendiri	Padang Panjang	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	1 Pelatihan	
V	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran daerah	Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Daerah	70 buku	
	2	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran daerah	Padang Panjang	Jumlah buku laporan keuangan Prognosis daerah	35 buku	
	3	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun daerah	Padang Panjang	Jumlah buku laporan akhir tahun daerah	100 buku	
				Jumlah koordinasi, konsultasi serta fasilitasi dalam daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum	50 kali	
	4	Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD	Padang Panjang	Jumlah buku laporan realisasi keuangan dan verifikasi data laporan keuangan	48 buku	

VI	<b>Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah</b>				
1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Padang Panjang	Jumlah buku Ranperda tentang APBD dan Ranperwako tentang APBD tahun anggaran 2020	200 buku	
			Jumlah koordinasi, konsultasi dan pembahasan Ranperda dalam daerah yang dilaksanakan	200 kali	
			Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	5 kali	
2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Padang Panjang	Jumlah buku Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranperwako tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019	200 buku	
			Jumlah koordinasi, konsultasi dan Pembahasan Ranperda dalam daerah yang dilaksanakan	150 kali	
			Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	2 kali	
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Padang Panjang	Jumlah Buku Ranperda dan Ranperwako pertanggungjawaban APBD	125 buku	
			Jumlah Buku Perda dan Perwako pertanggungjawaban APBD	125 buku	
			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu	13 kali	

			dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu		
4	Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Padang Panjang	Jumlah OPD pengguna sistem informasi pengelola keuangan daerah yang berbasis aplikasi dalam penyusunan perencanaan, penatusahaan keuangan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah	24 OPD	
			Jumlah Pelatihan SIPKD yang dilaksanakan	2 Pelatihan SIPKD	
			Jumlah Pemeliharaan Server aplikasi dan Hardware	2 Kali Pemeliharaan	
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Padang Panjang	Jumlah Peningkatan PAD	100 M	
6	Penelitian dan pengadaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA ) TA.2020 yang diteliti	460 buku	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA ) TA.2020 yang digandakan	460 buku	
7	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB	Padang Panjang	Jumlah Pencapaian Target PBB-P2 dan BPHTB	Target PBB-P2 sebanyak Rp.862.500.000,- dan BPHTB sebanyak Rp.1.100.000.000	
			Jumlah SPPT PBB-P2 yang dicetak	14.000.000.SPPT	
			Jumlah SPPT PBB P2 yang terdistribusikan	14.000.000.SPPT	
8	Penyusunan Laporan Semesteran dan tahunan Barang Milik Daerah	Padang Panjang	Jumlah Buku Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	60 buku	

			daerah yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu		
9	Pendataan Objek Pajak	Padang Panjang	Jumlah Kelurahan yang menjadi lokasi Update Data Objek Pajak PBB-P2	16 Kelurahan	
10	Penyusunan standar biaya	Padang Panjang	Jumlah Buku Standar Biaya Tahun anggaran 2020	70 buku	
11	Penghapusan dan Penjualan BMD	Padang Panjang	Jumlah Proses Pelaksanaan Penghapusan dan Lelang	4 Proses	
12	Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKPBMD dan DKPBMD	Padang Panjang	Jumlah buku data RKBMD dan RKPBM	30 buku	
13	Penyusunan Perubahan RKBMD, RKPBM, DKPBMD dan DKPBMD	Padang Panjang	Jumlah Buku Perubahan RKBMD dan RKPBM	60 buku	
14	Penyajian Data Aset Daerah	Padang Panjang	Jumlah buku data aset tetap Pemerintah Kota Padang Panjang	60 buku	
15	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Padang Panjang	Jumlah Rekonsiliasi yang dilakukan secara internal dan eksternal	39 kali	
			Jumlah Laporan data hasil rekonsiliasi keuangan daerah	39 laporan	
16	Pekan Pajak Daerah	Padang Panjang	Jumlah Pekan Pajak daerah	1 kegiatan ( 7 hari )	
			Jumlah Reward yang diberikan kepada Wajib Pajak	10 WP	
17	Kajian Potensi PAD Kota Padang Panjang	Padang Panjang	Jumlah Kajian Potensi Pendapatan pada RSUD Padang Panjang	1 kajian	
18	Sensus Aset	Padang Panjang	Jumlah Laporan Sensus Aset	30 buku	
19	Penyusunan Ranperda tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah	Padang Panjang	Jumlah Ranperda	1 Ranperda	



# 3

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 tercantum Visi *Kota Padang Panjang "Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera"*.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah 6 misi yakni :

1. Memantapkan tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan islami;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
4. Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Kota; dan
6. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, maka diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terlaksananya pembangunan yang ada di Kota Padang Panjang baik dari segi fisik maupun non fisik. Sedangkan misi yang diemban oleh BPKD Kota Padang Panjang dengan mengacu pada misi 1 yaitu "memantapkan tata kelola Pemerintahan yang amanah dan anti KKN". Maka dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, maka visi BPKD tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut :

**"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Anti KKN"**

Berpijak kepada hal tersebut diatas maka Badan Pengelola Keuangan daerah Kota Padang Panjang sebagai Pengemban fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah merumuskan 4 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional;
2. Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan anti KKN
3. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah
4. Menyempurnakan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Daerah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai penjabaran dari misi serta sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan.

#### A. TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki keahlian dan keterampilan serta komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesi.

2. Meningkatkan Tata Laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
4. Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang akuntabel dan profesional.
5. Meningkatkan aparatur yang bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan daerah.
6. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan dan menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.
8. Meningkatkan kualitas aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah.
9. Melakukan Inventarisasi seluruh Aset Daerah
10. Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah sehingga dapat menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah secara menyeluruh
11. Meningkatkan kualitas aparatur Pengelolaan Aset daerah.

## **B. SASARAN**

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terampil dan handal.
2. Tertatanya sistem dan prosedur mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah yang baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
4. Terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diyakini kewajarannya.
5. Terciptanya aparatur yang bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan daerah.
6. Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.
8. Terwujudnya kualitas aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah.
9. Terlaksananya Inventarisasi seluruh Aset Daerah.
10. Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah.
11. Terwujudnya kualitas aparatur Pengelola Aset Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan Renja SKPD**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :



**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

**KOTA PADANG PANJANG**

**NAMA OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
										1	2
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>				<b>Rp 10.677.673.600</b>				<b>Rp16.593.298.640</b>		
03	01	01		<b>Program Pelayanan Adminstarsi Perkantoran</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran		<b>90%</b>	<b>Rp 6.626.619.000</b>		<b>90%</b>	<b>Rp 7.951.942.800</b>
03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dibutuhkan	Padang Panjang	1 Tahun	Rp 14.750.000	APBD	3.000 lbr	Rp 17.700.000
					Jumlah Paket Pengiriman		1 Tahun			15 Paket/Pengiriman barang	
03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Telephone, Air, Listrik, Internet, TV Kabel dan Jasa Publikasi	Padang Panjang	60 Tagihan 1 Tahun Jasa Publikasi	Rp 305.800.000	APBD	60 Tagihan 1 Tahun Jasa Publikasi	Rp 366.960.000
03	01	01	03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Premi Asuransi Barang Milik Daerah yang diasuransikan	Padang Panjang	4 Polis	Rp 2.454.050.000	APBD	4 Polis	Rp 2.944.860.000

				/operasional	Gaji THL yang dibayarkan Gajinya								
03	01	01	05	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	Padang Panjang	75 Orang	Rp 1.900.000.000	APBD		75 Orang	Rp 2.280.000.000	
03	01	01	06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan yang diperlukan	Padang Panjang	1 Tahun	Rp 322.959.000	APBD		1 Tahun	Rp 387.550.800	
					Jumlah Gaji THL yang dibayarkan		1 Tahun				14 Orang		
03	01	01	07	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis kantor	Padang Panjang	1 Tahun	Rp 129.000.000	APBD		1 Tahun	Rp 154.800.000	
03	01	01	08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	1 Tahun	Rp 232.598.000	APBD		1 Tahun	Rp 279.117.600	
03	01	01	09	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen jaringan listrik kantor	Padang Panjang	1 Tahun	Rp 7.827.000	APBD		1 Tahun	Rp 9.392.400	
03	01	01	11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan Minuman untuk Tamu dan Rapat	Padang Panjang	1.300 oh	Rp 99.000.000	APBD		1.300 oh	Rp 118.800.000	
03	01	01	12	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi yang diikuti	Padang Panjang	65 Kali	Rp 420.000.000	APBD		70 Kali	Rp 504.000.000	
03	01	01	13	Penyediaan jasa Tenaga Administrasi /Teknik Perkantoran	Jumlah Gaji Tenaga Honorer dan Gaji THL	Padang Panjang	10 orang	Rp 205.954.000	APBD		1 ob	Rp 247.144.800	
03	01	01	15	Penyediaan Sewa Tanah	Jumlah tanah yang disewa untuk kepentingan publik	Padang Panjang	6 kapling	Rp 71.000.000	APBD		6 kapling	Rp 85.200.000	
03	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>90%</b>	<b>Rp 527.100.000</b>			<b>90%</b>	<b>Rp 632.520.000</b>	
03	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Padang Panjang	Pengadaan 10 unit komputer PC, 25 Unit UPS, 10 Unit Printer, 5 Unit Laptop, 2 Unit Printer laser jet, 1 Unit	Rp 322.600.000	APBD		Pengadaan 10 unit komputer PC, 25 Unit UPS, 10 Unit Printer, 5 Unit Laptop, 2 Unit Printer laser jet, 1 Unit Mesin Fotocopy,	Rp 387.120.000	

							I set CCTV						
03	01	02	22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung Kantor secara berkala	Padang Panjang	1 Gedung	Rp 160.000.000	APBD		1 Gedung	Rp 192.000.000	
03	01	02	28	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor secara berkala	Padang Panjang	1 Tahun	Rp 44.500.000	APBD		1 Tahun	Rp 53.400.000	
03	01	04		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/ bintek</b>		<b>35 orang</b>	<b>Rp 100.000.000</b>			<b>35 orang</b>	<b>Rp 120.000.000</b>	
03	01	04	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS untuk mengikuti bintek tentang peraturan perundang-undangan	Padang Panjang	35 Orang	Rp 100.000.000	APBD		35 Orang	Rp 120.000.000	
03	01	05		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 19.996.600</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 23.995.920</b>	
03	01	05	01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah buku laporan keuangan semesteran daerah yang jelas dan akuntabel	Padang Panjang	95 buku	Rp 14.996.600	APBD		95 buku	Rp 17.995.920	
					Jumlah buku Laporan keuangan Prognosis Daerah								
03	01	06	02	Penyusunan Perencanaan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Pelaporan	Padang Panjang	6 Laporan	Rp 5.000.000	APBD		6 Laporan	Rp 6.000.000	
03	01	05		<b>Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP Dan peraturan perundang-undangan lainnya</b>		<b>90%</b>	<b>Rp.1.503.190.000</b>			<b>90%</b>	<b>Rp.1.706.626.000</b>	

03	01	01	02	Penyusunan ranperda tentang APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Perda APBD serta Ranperwako dan Perwako APBD TA 2020, Buku Perwako Pergeseran APBD 2019	Padang Panjang	5 Dokumen	Rp 157.950.000	APBD		5 Dokumen	Rp 189.540.000
03	01	01	03	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah dokumen ranperda dan perda perubahan APBD seta ranperwao dan perwako perubahan APBD TA 2019	Padang Panjang	4 Dokumen	Rp 143.240.000	APBD		4 Dokumen	Rp 171.888.000
03	01	01	04	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Padang Panjang	110 buku	Rp 88.620.000	APBD		110 buku	Rp 106.344.000
03	01	01	05	Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pelatihan SIPKD aset dan keuangan serta e-budgeting bagi tim admin dan operator SIPKD OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	Padang Panjang	2 kali pelatihan	Rp 199.996.000	APBD		2 kali pelatihan	Rp 239.995.200
					Jumlah pemeliharaan server aplikasi dan hardware		1 Tahun				1 Tahun	
03	01	01	06	Penelitian dan penggandaan DPA-OPD dan DPPA OPD	Jumlah buku DPA SKPD dan DPPA SKPD Kota Padang Panjang	Padang Panjang	600 buku	Rp 54.505.000	APBD		600 buku	Rp 65.406.000
03	01	01	07	Penyusunan Standar Biaya	Jumlah Buku Standar Biaya di Kota Padang Panjang	Padang Panjang	70 Buku	Rp 4.710.000	APBD		70 Buku	Rp 5.200.000

				Keuangan daerah								
03	01	01	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun daerah	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun daerah tahun 2018	Padang Panjang	100 buku	Rp 116.800.000	APBD		100 buku	Rp 140.160.000
03	01	01	10	Verifikasi data laporan keuangan SKPD	Jumlah buku informasi dan laporan SKPD yang akurat per triwulan	Padang Panjang	48 buku	Rp 49.894.000	APBD		48 buku	Rp 59.872.800
03	01	01	11	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Jumlah rekonsiliasi Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan	Padang Panjang	39 kali	Rp 100.000.000	APBD		39 kali	Rp 120.000.000
					Jumlah laporan data hasil rekonsiliasi keuangan daerah		39 laporan				39 laporan	
03	01	01	12	Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPA Tahun 2020	Padang Panjang	2 Dokumen	Rp 284.250.000	APBD		2 Dokumen	Rp 341.100.000
03	01	01	13	Penyusunan KUA PPAS Perubahan	Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan 2019	Padang Panjang	2 Dokumen	Rp 122.600.000	APBD		2 Dokumen	Rp 147.120.000
03	01	01	14	Kajian Investasi Penyertaan modal daerah	Jumlah dokumen kajian yang disusun	Padang Panjang	2 Dokumen	Rp 100.000.000	APBD		2 Dokumen	Rp 120.000.000
03	01	02		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan serta Pelayanan Pendapatan Daerah</b>		<b>80%</b>	<b>Rp 1.627.200.000</b>			<b>80%</b>	<b>Rp 1.837.536.000</b>
03	01	02	01	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah pencapaian Pendapatan daerah dari Pajak daerah	Padang Panjang	100 M	Rp 980.000.000	APBD		100 M	Rp 1.1760.000.000
03	01	02	02	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB	Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan	Padang Panjang	14000 lbr	Rp 141.080.000	APBD		14000 lbr	Rp 169.296.000

03	01	02	04	Penghapusan data piutang penyerahan PBB-P2	Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB-P2 Kota Padang Panjang	Padang Panjang	1 Perwako	Rp 45.920.000	APBD			
03	01	02	05	Kajian Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian Potensi PAD	Padang Panjang	1 Kajian	Rp 50.000.000	APBD			
03	01	02	06	Pekan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pekan Pajak Daerah	Padang Panjang	1 Kegiatan	Rp 200.800.000	APBD		1 Kegiatan	Rp 240.960.000
03	01	03		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Persentase aset yang dikelola dengan baik</b>		<b>90%</b>	<b>Rp 273.568.000</b>			<b>90%</b>	<b>Rp 304.281.600</b>
03	01	03	01	Penghapusan dan Penjualan BMD	Jumlah proses penghapusan dan penjualan BMD	Padang Panjang	4 kali	Rp 109.253.000	APBD		4 kali	Rp 131.103.600
03	01	03	03	Penyusunan RKBMD, RKPBMMD, RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD	Jumlah buku RKBMD dan RKPBMMD Kota Padang Panjang	Padang Panjang	30 Buku	Rp 18.465.000	APBD		30 Buku	Rp 22.158.000
03	01	03	03	Penyajian data aset daerah	Jumlah buku data aset tetap pemerintah Kota Padang Panjang	Padang Panjang	60 Buku	Rp 11.620.000	APBD		60 Buku	Rp 13.944.000
03	01	03	04	Sensus Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah buku laporan inventaris / sensus barang milik daerah	Padang Panjang	30 Buku	Rp 100.600.000	APBD		30 Buku	Rp 120.720.000
03	01	03	05	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah	Jumlah buku laporan semesteran dan laporan tahunan aset daerah yang disusun	Padang Panjang	60 Buku	Rp 17.040.000	APBD		60 Buku	Rp 20.448.000
03	01	03	06	Penyusunan Perubahan RKBMD, RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD	Jumlah buku perubahan RKBMD dan RKPBMMD Kota Padang Panjang	Padang Panjang	30 Buku	Rp 16.590.000	APBD		30 Buku	Rp 19.908.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>				<b>Rp 1.619.350.000</b>				<b>Rp. 1.219.040.000</b>		
1	20	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>90%</b>	<b>Rp 1.070.750.000.</b>		<b>Rp 547.620.000.</b>	
03	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Padang Panjang	kendaraan roda 4, 1 unit Roda 2, 8 unit	Rp 160.500.000	APBD	kendaraan roda 4, 1 unit Roda 2, 8 unit	Rp 160.500.000
03	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang di bangun	Padang Panjang	1 Buah Lift	Rp. 587.650.000	APBD		
1	20	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah pakaian dinas untuk Pegawai Di lingkungan BPKD</b>		<b>65 Orang</b>	<b>Rp. 95.000.000</b>		<b>65 Orang</b>	<b>Rp. 95.000.000</b>
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan pakaian khusus / hari tertentu untuk pegawai di lingkungan BPKD	Padang Panjang	65 Orang	Rp. 95.000.000	APBD	65 Orang	Rp. 95.000.000
03	01	04		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/ bintek</b>		<b>72 Orang</b>	<b>Rp 193.600.000</b>		<b>72 orang</b>	<b>Rp 232.320.000</b>
03	01	04	06	Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pegawai di lingkungan BPKD yang mengikuti pelatihan	Padang Panjang	72 orang	Rp 193.600.000	APBD	72 orang	Rp 232.320.000

# 4

## PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan ditingkat OPD, BPKD telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah (Renstra BPKD) Tahun 2017 - 2018 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 2 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPKD. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka seluruh SKPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing.

Sehubungan dengan ini maka BPKD juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja BPKD (Renja BPKD) tahun 2018 Renja BPKD ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKD ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf BPKD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsure BPKD, dengan cara member dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

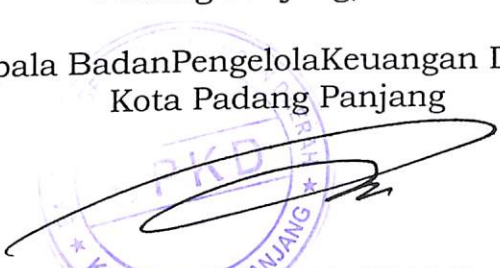
Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja BPKD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsure BPKD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik

Dari segi tatakelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan / perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2018, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja BPKD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, 2018

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kota Padang Panjang



INDRA GUSNADY, SE, M.Si  
NIP.19700804 199803 1 006